

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab IV, maka peneliti memperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Peranan Sektor Basis dan Non-Basis Dalam Mengatasi Disparitas Pendapatan Di Kawasan Bregas Jawa Tengah” sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient, Kawasan Bregas Jawa Tengah memiliki 7 sektor basis, yakni sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa lainnya.
2. Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson, tingkat disparitas pendapatan dari tahun 2016 hingga 2021 mengalami fluktuatif dari 0.3678 pada tahun 2016. Kemudian pasca Covid-19 atau dapat dikatakan efek dari adanya wabah tersebut disparitas kawasan Bregas mengalami penurunan menjadi 0,3674 pada tahun 2020, setelah itu secara perlahan terus naik hingga menjadi 0,3680 pada tahun 2021.
3. Berdasarkan hasil Tipologi Klassen daerah menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 kota yang masuk dalam kategori maju tapi tertekan (kuadran II) yaitu Kota Tegal, lalu yang masuk dalam kategori berkembang pesat (kuadran III) yaitu Kabupaten Tegal (Slawi), dan yang masuk dalam

kategori tertinggal (kuadran VI) yaitu Kabupaten Brebes. Tidak ada yang masuk dalam kategori daerah cepat maju (kuadran I).

4. Hanya terdapat 2 sektor basis yang mampu dalam mengurangi tingkat disparitas pendapatan di kawasan Bregas Jawa Tengah, yakni sektor Pertanian dan sektor pertambangan. Sektor basis yang memiliki peran paling besar dalam mengurangi disparitas pendapatan kawasan Bregas Jawa Tengah adalah sektor pertanian. Dimana tingkat disparitas pendapatan lebih rendah jika dibandingkan tanpa memasukkan sektor pertanian, yakni dengan rata-rata persentase perubahan sebesar 22,00%.

5.2 Saran

1. Perlunya kebijakan pemerintah dengan memprioritaskan pembangunan daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah maju tapi tertekan (kuadran II) dan daerah berkembang cepat (kuadran III) dengan memberikan pembiayaan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan, pelatihan serta kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah yang menggunakan teknologi lebih modern.
2. Pemerintah daerah hendaknya semakin aktif dalam pemasaran dan promosi potensi wilayah dengan penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Antar Daerah (BKAD) dengan adanya kerjasama antar daerah dibidang tenaga kerja, pariwisata, perdagangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar merangsang investasi baru melalui kebijakan daerah dengan mempermudah perijinan usaha dan keringanan pajak, sebagai upaya

terciptanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan antar daerah. Memperluas infrastruktur terkait pasokan listrik, air bersih, telekomunikasi.

3. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor ekonomi basis yang memiliki daya saing secara merata, melibatkan dan dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat agar disparitas pendapatan yang terjadi tidak semakin meningkat. Perlunya kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah sesuai dengan potensi ekonomi serta memberikan pelatihan berwisata kepada para pelaku sektor potensial sehingga terciptanya lapangan pekerjaan baru serta menguatkan industri berbasis rakyat dengan pengembangan destinasi wisata.